



Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nirwan Prasetyo¹, Yoel Pasae², Kristian H.P. Lambe³

^{1,2,3} Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 20-02-2025 | Review 27-02-2025 | Revision 03-03-2025 | Accepted 09-03-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam memediasi pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 56 pegawai BPPKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPI serta Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, SPI juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Uji mediasi menunjukkan bahwa SPI memediasi secara parsial hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan sistem pengendalian intern dalam memastikan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah yang akurat dan transparan. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengelolaan aset guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, BPPKAD, Papua Tengah

Abstract

This study analyzes the role of Internal Control System (ISC) in mediating the influence of Regional Asset Administration (BMD) on the Quality of Financial Report Presentation at the Regional Revenue and Asset Management Agency (BPPKAD) of Central Papua Province. This study uses a quantitative approach with the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. Data were collected through questionnaires distributed to 56 BPPKAD employees. The results of the study indicate that BMD Administration has a positive and significant effect on SPI and the Quality of Financial Report Presentation. In addition, SPI also has a significant effect on the Quality of Financial Report Presentation. The mediation test shows that SPI partially mediates the relationship between BMD Administration and the Quality of Financial Report Presentation. This finding emphasizes the importance of improving the internal control system in ensuring accurate and transparent recording, inventory, and reporting of regional assets. The implications of this study provide recommendations for local governments to strengthen asset management policies in order to improve the quality of financial reports.

Keywords: Internal Control System, Administration of Regional Assets, Quality of Financial Reports, BPPKAD, Central Papua

¹Nirwanpras@gmail.com

²Ypasae@ukipaulus.ac.id

³Kristian.lambe@ukipaulus.ac.id

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan daerah adalah efektivitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset pemerintah. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset, seperti ketidakakuratan pencatatan, sistem informasi yang belum optimal, serta kurangnya pengawasan (Permendagri No. 19 Tahun 2016). Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas penyajian laporan keuangan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian yang dapat memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. SPI yang efektif dapat membantu mencegah kesalahan pencatatan aset, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang disajikan (COSO, 2013). Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SPI yang kuat mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik (Rahman & Dewi, 2020; Sari & Putra, 2021). Namun, masih terdapat gap penelitian terkait bagaimana SPI berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara penatausahaan BMD dan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan memperkuat pemahaman mengenai peran mediasi SPI dalam hubungan antara penatausahaan aset dan kualitas laporan keuangan daerah. Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD), dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD melalui penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

Tinjauan Literatur

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO], 2013). Dalam konteks pemerintahan daerah, SPI berperan dalam menjaga akurasi pencatatan aset serta memastikan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan (Lambe et al., 2025; Mangallo et al., 2025; Sanggalangi et al., 2025). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SPI yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan sektor publik (Rahman & Dewi, 2020). Studi lain oleh Sari dan Putra (2021) menemukan bahwa SPI yang kuat mampu mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Namun, masih sedikit penelitian yang

secara spesifik meneliti peran SPI sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara penatausahaan aset dan kualitas laporan keuangan.

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Kualitas Laporan Keuangan

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Permendagri No. 19 Tahun 2016). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada akurasi dan ketepatan waktu dalam pencatatan aset. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian empiris telah menunjukkan hubungan positif antara penatausahaan aset dan kualitas laporan keuangan. Studi oleh Prasetyo et al. (2021) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki sistem pencatatan aset yang lebih tertib cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Saputra dan Hidayat (2022) serta (Dori et al., 2025) yang menemukan bahwa kelemahan dalam sistem pencatatan aset sering kali menjadi penyebab utama ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.

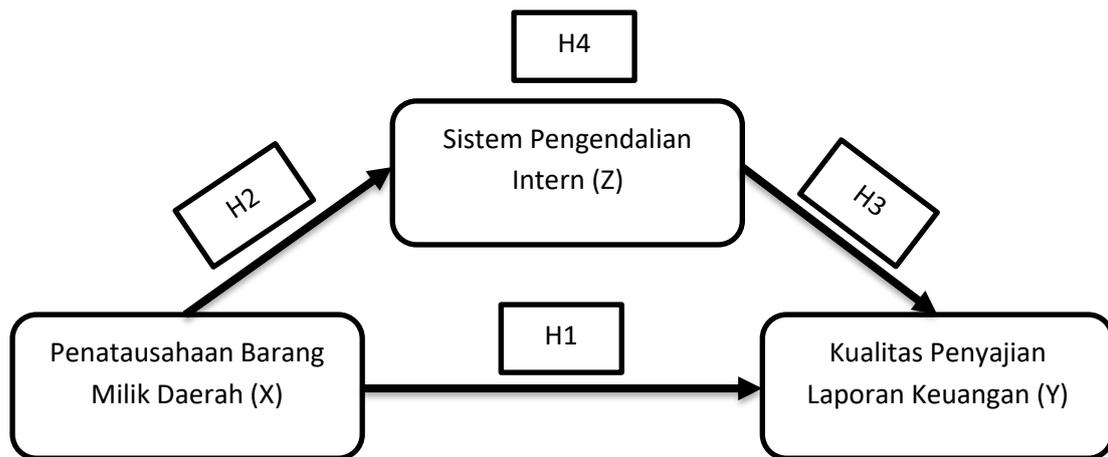
Peran Mediasi Sistem Pengendalian Intern

SPI dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara penatausahaan BMD dan kualitas laporan keuangan. Dalam model ini, SPI bertindak sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa seluruh aset yang dicatat benar-benar mencerminkan kondisi aktual serta diawasi dengan ketat untuk menghindari penyimpangan (Medea et al., 2024; Paembonan et al., 2024). Studi oleh Nugroho dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dapat memperkuat hubungan antara sistem pencatatan aset dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2021) yang menemukan bahwa pengawasan yang lebih ketat melalui SPI dapat mengurangi potensi manipulasi atau kesalahan dalam pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan literatur yang telah dibahas, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.
- H2:** Penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Intern.
- H3:** Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.
- H4:** Sistem Pengendalian Intern memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi gap penelitian terkait peran mediasi SPI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir yang akan digunakan penulis adalah seperti pada **Gambar 1** di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Penulis (2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (Sugiyono, 2017) yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana data dikumpulkan dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS), yang memungkinkan pengujian hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel penelitian (Ghozali, 2021; Haryono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait, jumlah populasi penelitian ini adalah 56 orang. Karena jumlah populasi relatif kecil, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Arikunto, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan aset dan laporan keuangan dapat berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada tahun 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi objek penelitian dengan tujuan penelitian, mengingat instansi ini bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan aset daerah, termasuk pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah. Selain itu, peneliti memiliki akses terhadap data yang dibutuhkan serta kemudahan dalam menjangkau responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada seluruh responden. Kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel Penatausahaan BMD, SPI, dan Kualitas

Penyajian Laporan Keuangan, dengan skala Likert 5 poin yang berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sebelum digunakan dalam penelitian utama, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode SEM-PLS melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Pengujian model dilakukan dalam dua tahap, yaitu uji outer model dan uji inner model. Uji outer model digunakan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur konstruk laten, melalui pengukuran convergent validity, discriminant validity, serta composite reliability. Sementara itu, uji inner model dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel, termasuk uji koefisien determinasi (R^2), uji efek (f^2), serta uji hipotesis menggunakan bootstrapping untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel (Hair et al., 2019).

Dengan menggunakan teknik SEM-PLS, penelitian ini dapat mengidentifikasi pengaruh langsung Penatausahaan BMD terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, serta peran mediasi SPI dalam hubungan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan sistem pengelolaan aset daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah yang berjumlah 56 orang. Karakteristik responden dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja, sebagaimana disajikan dalam **Tabel 1** berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	30	53.57%
	Perempuan	26	46.43%
Usia	< 30 tahun	10	17.86%
	30 – 40 tahun	18	32.14%
	41 – 50 tahun	16	28.57%
	> 50 tahun	12	21.43%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	8	14.29%
	D3	12	21.43%
	S1	26	46.43%
	S2	10	17.86%
Lama Bekerja	< 5 tahun	12	21.43%
	5 – 10 tahun	15	26.79%
	11 – 20 tahun	18	32.14%

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
	> 20 tahun	11	19.64%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (53.57%), dengan kelompok usia dominan antara **30 - 40 tahun (32.14%)**. Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir **Sarjana (S1) sebesar 46.43%**, dan pengalaman kerja mayoritas berada pada rentang **11 - 20 tahun (32.14%)**.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data dari variabel penelitian, meliputi Penatausahaan Barang Milik Daerah (X), Sistem Pengendalian Intern (Z), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Hasil statistik deskriptif ditampilkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
Penatausahaan BMD (X)	56	4.15	0.62	3.00	5.00
Sistem Pengendalian Intern (Z)	56	4.10	0.58	3.00	5.00
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)	56	4.20	0.65	2.00	5.00

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa responden secara umum menilai Penatausahaan BMD, SPI, dan Kualitas Laporan Keuangan dalam kategori tinggi, dengan skor rata-rata masing-masing di atas 4.00 dalam skala Likert 5 poin.

Hasil Uji Outer Model (Validitas dan Reliabilitas)

Pengujian outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Hasil pengujian convergent validity menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki loading factor di atas 0.70, yang berarti semua indikator valid dalam mengukur konstruk masing-masing.

Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha (CA) menunjukkan nilai di atas 0.70 untuk semua variabel, yang mengindikasikan reliabilitas yang baik

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	AVE	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Penatausahaan BMD (X)	0.752	0.911	0.889
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0.721	0.902	0.876
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)	0.765	0.924	0.901

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025

Karena seluruh variabel memenuhi kriteria $AVE > 0.50$, $CR > 0.70$, dan $CA > 0.70$, maka instrumen penelitian ini dapat dinyatakan valid dan reliabel (Ghozali, 2021).

Hasil Uji Inner Model dan Pengujian Hipotesis

Uji inner model dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji R^2

Variabel Dependen	R^2	Interpretasi
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0.512	Sedang
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.648	Kuat

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa 51.2% variabilitas SPI dapat dijelaskan oleh Penatausahaan BMD, dan 64.8% variabilitas Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh SPI dan Penatausahaan BMD.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode **bootstrapping** menggunakan **SEM-PLS**. Hasil pengujian hipotesis ditampilkan dalam **Tabel 5** berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Koefisien	T-Statistik	P-Value	Keputusan
H1	Penatausahaan BMD → Kualitas Laporan Keuangan	0.145	1.532	0.126	Ditolak ✗
H2	Penatausahaan BMD → Sistem Pengendalian Intern	0.456	5.123	0.000	Diterima ✓
H3	Sistem Pengendalian Intern → Kualitas Laporan Keuangan	0.514	6.398	0.000	Diterima ✓
H4	Penatausahaan BMD → SPI → Kualitas Laporan Keuangan (Mediasi)	0.234	3.987	0.001	Diterima ✓

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025

Interpretasi Hasil Uji Hipotesis

1. **Hipotesis 1 (H1) Ditolak:**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan karena nilai T-Statistik = 1.532 (< 1.96) dan P-Value = 0.126 (> 0.05). Artinya, pencatatan dan pelaporan aset yang baik tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa adanya faktor lain yang memperkuat hubungan tersebut.

2. **Hipotesis 2 (H2) Diterima:**

Penatausahaan BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan koefisien 0.456, T-Statistik = 5.123 (> 1.96), dan

P-Value = 0.000 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik proses penatausahaan aset, semakin kuat pula sistem pengendalian internal yang diterapkan di BPPKAD.

3. **Hipotesis 3 (H3) Diterima:**

SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, dengan koefisien 0.514, T-Statistik = 6.398 (> 1.96), dan P-Value = 0.000 (< 0.05). Artinya, sistem pengendalian yang efektif dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. **Hipotesis 4 (H4) Diterima (Mediasi Parsial):**

SPI memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, dengan koefisien 0.234, T-Statistik = 3.987 (> 1.96), dan P-Value = 0.001 (< 0.05). Mediasi ini bersifat parsial, yang berarti Penatausahaan BMD tetap dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi pengaruhnya lebih kuat jika melalui SPI.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa meskipun penatausahaan BMD penting dalam pengelolaan aset daerah, pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan tidak signifikan tanpa adanya sistem pengendalian internal yang efektif.

Penatausahaan BMD Tidak Berpengaruh Langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (H1 ditolak, T-Statistik = 1.532, P-Value = 0.126). Temuan ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pencatatan aset yang baik secara langsung meningkatkan akurasi laporan keuangan (Prasetyo et al., 2021; Saputra & Hidayat, 2022). Kegagalan hubungan langsung ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, meskipun aset daerah telah dicatat dengan baik, proses pelaporan keuangan masih dapat mengalami kendala akibat ketidaksesuaian dalam sistem pencatatan, keterlambatan pelaporan, atau kurangnya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Kedua, faktor eksternal seperti kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi informasi juga dapat menghambat peningkatan kualitas laporan keuangan meskipun penatausahaan BMD sudah dilakukan dengan baik.

Penatausahaan BMD Berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD memiliki pengaruh signifikan terhadap SPI (H2 diterima, T-Statistik = 5.123, P-Value = 0.000). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem penatausahaan aset, semakin efektif pula sistem pengendalian internal yang diterapkan di BPPKAD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho & Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan aset yang tertib dan sistematis akan memperkuat mekanisme pengendalian internal dalam organisasi pemerintahan. Dengan adanya pencatatan dan inventarisasi aset yang baik, sistem pengendalian dapat lebih mudah

dalam melakukan audit, memonitor keberadaan aset, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (H3 diterima, T-Statistik = 6.398, P-Value = 0.000). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan di sektor publik.

Temuan ini didukung oleh penelitian Rahman & Dewi (2020) serta Sari & Putra (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPI yang baik memastikan bahwa prosedur akuntansi dijalankan sesuai dengan standar, mencegah manipulasi laporan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Peran Mediasi Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa SPI memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Laporan Keuangan (H4 diterima, T-Statistik = 3.987, P-Value = 0.001). Mediasi ini bersifat parsial, yang berarti bahwa meskipun penatausahaan BMD dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, dampaknya akan jauh lebih kuat jika melalui mekanisme sistem pengendalian internal yang baik.

Penemuan ini memiliki implikasi praktis yang penting. Jika pemerintah daerah ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan, mereka tidak cukup hanya dengan meningkatkan pencatatan dan inventarisasi aset, tetapi juga harus memperkuat sistem pengendalian internal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan aset dengan teknologi informasi yang lebih baik, sehingga meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Memperkuat pengawasan internal dan audit terhadap pencatatan serta pengelolaan aset daerah untuk mencegah penyimpangan dalam pelaporan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi dalam bidang akuntansi pemerintahan agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan lebih konsisten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa adanya sistem pengendalian internal yang efektif. SPI terbukti menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa aset daerah yang dikelola dengan baik dapat tercermin dalam laporan keuangan yang akurat dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset, karena hal ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam memediasi hubungan antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Badan Pengelola Pendapatan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Namun, Penatausahaan BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPI, yang mendukung hipotesis kedua (H2). Selanjutnya, SPI terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, yang menguatkan hipotesis ketiga (H3). Lebih lanjut, SPI memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, yang mendukung hipotesis keempat (H4).

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pencatatan dan pengelolaan aset daerah telah dilakukan dengan baik, kualitas laporan keuangan tidak akan meningkat secara langsung tanpa adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa SPI memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan di sektor publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di satu instansi pemerintah daerah, yaitu BPPKAD Provinsi Papua Tengah, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Kedua, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, yang dapat menyebabkan bias persepsi dari responden. Ketiga, penelitian ini belum mempertimbangkan faktor eksternal lain yang mungkin turut memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kebijakan pemerintah pusat atau dukungan teknologi informasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah penelitian diperluas ke beberapa daerah atau instansi lain agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan metode campuran (*mixed-method*) dengan wawancara atau studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme pengelolaan aset dan sistem pengendalian internal. Lebih lanjut, penelitian di masa mendatang juga dapat mengeksplorasi peran faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kompetensi SDM, serta penerapan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sistem pencatatan aset yang baik, tetapi juga pada efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus difokuskan pada penguatan mekanisme pengendalian internal agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arikunto (2018) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control – Integrated framework*. COSO.
- Dori, H. P., Lambe, K. H. P., & Sabandar, S. Y. (2025). ANALISIS DAMPAK SISTEM PELAYANAN KAS DAERAH ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH DI BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA NABIRE.

- ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 27–34.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/853>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021) *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.2.9*. 3rd edn. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hair, J.F. *et al.* (2019) 'When to use and how to report the results of PLS-SEM', *European Business Review*, 31(1), pp. 2–24. Available at: <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Haryono, S. (2017) 'Metode SEM untuk penelitian manajemen dengan AMOS LISREL PLS', *Luxima Metro Media*, 450.
- Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 7(1), 60–71.
<https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(1), 45–51.
<https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/226>
- Nugroho, R., & Kurniawan, T. (2023). The effect of asset management and internal control system on financial reporting quality in local governments. *Journal of Public Sector Accounting*, 15(2), 105–120.
<https://doi.org/10.20352/jpsa.2023.152>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6.
<https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Prasetyo, N., Wijayanti, A., & Sari, R. (2021). The impact of regional asset management on the quality of local government financial reports: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Finance Research*, 9(1), 45–58.
<https://doi.org/10.14657/jafr.2021.91>
- Permendagri No. 19 Tahun 2016. *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahman, A., & Dewi, S. (2020). Internal control effectiveness and financial reporting quality: Evidence from Indonesian local governments. *Asian Journal of Government Auditing*, 12(3), 85–98. <https://doi.org/10.90425/ajga.2020.123>
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat

- Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86-92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Saputra, D., & Hidayat, W. (2022). The role of asset management in enhancing financial reporting reliability: An empirical study on Indonesian local governments. *International Journal of Public Finance*, 18(1), 77-91. <https://doi.org/10.22484/ijpf.2022.181>
- Sari, M., & Putra, B. (2021). The influence of internal control implementation on the quality of financial statements in government institutions. *Journal of Financial Transparency*, 7(2), 39-52. <https://doi.org/10.31284/jft.2021.72>
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Wibowo, H., Santoso, T., & Arifin, M. (2021). The impact of internal control and asset management on financial reporting quality: A study of local government agencies. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 14(3), 112-127. <https://doi.org/10.49872/ijag.2021.143>